IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE TERHADAP MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATI GEDE KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PADA DINAS YANG MEMBIDANGI PASAR DI KABUPATEN/KOTA WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG)

Oleh

Abdulloh¹⁾, Engkus²⁾, Heldi³⁾

^{1),2),3)}Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

¹⁾Abdulkhatab123@gmail.com,²⁾ekustyana16@gmail.com,³⁾heldi.uinbdg@gmail.com

ABSTRAK. Implementasi kebijakan merupakan perwujudan untuk mencapai tujuan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi bahwa kebijakan dianggap merugikan masyarakat. Begitupun dalam implementasi kebijakan pembangunan waduk Jatigede menyebabkan hilangnya atau berubahnya mata pencaharian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan terhadap mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Teori penelitian ini dalam variabel X menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980) dalam (AG.Subarsono 2011:93-94) yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sedangkan variabel Y menggunakan teori Adon Nasrulloh Jamaludin (2015) yaitu sektor pertanian dan non pertanian dengan menggunakan metode kuantitatif serta pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara tidak terstruktur, observasi, dan kuesioner yang disebar kepada 100 responden), dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa isi kebijakan berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat (34,7%) dan sisanya 65,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya, lingkungan kebijakan berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat (52,0%) dan sisanya 48,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel implementasi kebijakan terdapat pengaruh yang signifikan (46,5%) dan 53,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dengan demikian disimpulkan terjadi pengaruh yang tinggi dari implementasi kebijakan terhadap mata pencaharian masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, dampak kebijakan, mata pencaharian.

ABSTRACT. *The implementation of Policy is the objectives achieve of the policies. But the problem that often seem to give detriment to the society. Likewise in the implementation of development policies of Jatigede reservoir that causes the loss and the changes of their livelihoods. This study aims to determine how much the dimension influence in which the contents of policy implementation i.e. the content of the policy and environmental policy on the livelihood of people in the Jatigede district in Sumedang regency. The theory used in this study for the variable X are the theory of Merilee S, and Grindle's theory (1980) in AG.Subarsono 2011: 93-94 that is about the content of the policy and the policy environment while the variable Y uses the theory of Adon Nasrulloh Jamaludin (2015), namely agriculture and non-agriculture. The method used is quantitative method with associative approach. Collecting of data was conducted through literature study and field study(unstructured interviews, observations, and questionnaires distributed to 100 respondents) with proportionate stratified random sampling technique. Based on the result, it is shown that the contents of the policy affect the people's livelihood (34.7%) and the remaining (65.3%) is influenced by other variables, the policy environment affect the people's livelihood by 52.0% and the remaining 48.0% is influenced by variables more. As for the variable policy implementation a significant influence amounted to 46,5% and 53,5% influenced by other variables. It can be concluded that there is a high impact of the policy implementation to livelihoods.*

Keywords: Policy implementation, impact of the policy, livelihood.

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan waduk Jatigede merupakan salah satu dari program pemerintah guna menjawab berbagai macam permasalahan yang ada. Dalam rangka pembangunan waduk tersebut, pemerintah telah mensosialisasikan berbagai keunggulan pembangunan waduk dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Dengan diadakannya kebijakan pembangunan waduk Jatigede diharapkan permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan Pasal 4 ayat 1 dan 2 : (1) Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air. Dan ayat (2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk menyediakan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 pasal 4 ayat (1) dan (2) Gagasan pembangunan waduk Jatigede diajukan pertama kali pada tahun 1963 oleh pemerintah, kemudian ditindak lanjuti dengan *Detail Engineering Design* (DED) pada tahun 1968 oleh konsultan *Small and Medium Enterprise Credit* (SMEC), Australia. Kemudian direview kembali pada tahun 2004 oleh konsultan

PT. Indra Karya Jo serta PT. Wiratamadan telah mendapatkan sertifikat desain dari Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 23 Ferbruari 2006 (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pembangunan Waduk Jatigede, 2011).

Penduduk di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang bermata pencaharian petani yang sebagian besar wilayahnya juga merupakan lahan pertanian. Pertanian memiliki peranan yang sangat penting baik bagi sektor perekonomian maupun untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Tabel 1. Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan

Tahun	Teknis	Non Teknis
(1)	(2)	(3)
2012	-	1.609
2013	-	1.609
2014	-	1.594
2015	-	1.417

Sumber: *UPTD Pertanian Tanaman Pangan, Potensi Desa diolah BPS, 2016*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimanakah dampak nikah siri yang terjadi selama ini ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi nikah siri di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung kabupaten Cianjur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur tahun 2016. Sumber datanya adalah Laporan Kepala Desa, H. Asep Wahyu SH., 2015. Penduduk Desa Jatisari beragama Islam, yang berjumlah 7.586 jiwa, terdiri dari 3.453 jiwa laki-laki dan 4.133 perempuan. Kondisi riil dari pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa masyarakat Desa Jatisari yang melakukan nikah siri kebanyakan berasal dari keluarga yang memang kurang mampu. Sebagian besar hanya berpendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar(SD), bagi seorang laki-laki kebanyakan setelah lulus dari SD ataupun dari SMP mereka lebih memilih untuk bekerja ke luar kota. Sebagian kecil pemahaman masyarakat terutama bagi seorang perempuan bahwa pendidikan tidaklah dianggap penting, sebab anggapan orang tua seorang wanita

nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Apabila anak perempuan yang telah lulus dari sekolah dianggap telah dewasa, mampu menjadi seorang istri, dan orang tuapun sudah lepas dari tanggung jawab setelah anaknya menikah. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam peneltian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat inferential, yaitu metode penelitian untuk masalah-masalah yang aktual atau masalah atau masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam rangka pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1). Teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek-obyek yang perlu diteliti serta berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. (2). Teknik wawancara atau tanya-jawab yaitu mengadakan pembicaraan dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat yang ada kaitannya dengan obyek dan masalah yang diteliti. (3). Metode historik ini dipergunakan untuk memperoleh bahan- bahan yang berhubungan dengan teori- teori yang dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk membahas, memahami dan menjelaskan masalah dan obyek yang sedang diteliti. Metode ini dipergunakan juga untuk bahan perbandingan. Dengan melihat dokumen yang tersedia di desa Jatisari peneliti maksudkan untuk melihat realisasi rencana

pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Selain itu peneliti menggunakan untuk melihat data historis desa Jatisari. (4). Angket akan dipergunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat desa Jatisari.

Data yang diperoleh, sebagai hasil angket dari seluruh warga desa Jatisari, penulis tampilkan dalam bentuk tabulasi. Cara ini yakni dengan jalan menghitung data yang dipergunakan dengan sistem persentase. Dengan cara perhitungan data hasil angket dari masyarakat yang dipergunakan peneliti, selanjutnya hasilnya pada uraian berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah siri adalah suatu perkawinan yang memenuhi rukun Islam tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kondisi sosial ekonomi

Salah satu alasan warga Desa Jatisari melakukan nikah siri yaitu karena kondisi sosial ekonomi yang tidak memungkinkan, dalam pencatatan perkawinan dibutuhkan biaya yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, dengan terbatasnya dana yang dimiliki oleh calon pengantin maka dari itu mereka lebih memilih untuk menikah di

bawah tangan atau nikah siri yang sah menurut syariat islam dan rukun islam.

Pihak yang melakukan perkawinan di bawah tangan di desa Jatisari dari hasil penelitian adalah warga yang beragama Islam, pihak yang tingkat pendidikannya rendah. Bagaimana tidak, kebanyakan mereka yang menikah siri hanya orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dari keterbatasan dan ketidak adanya biaya itulah akhirnya mereka lebih memilih untuk menikah secara siri.

Maka dari itulah mereka tidak memikirkan akibat apa yang ditimbulkandari pelaksanaan nikah siri tersebut, mereka hanya mementingkan bahwa perkawinan yang mereka lakukan adalah sah menurut agama walaupun tidak ada bukti yang autentik yaitu akta perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

2) Tingkat Pendidikan dan kesadaran hukum yang Rendah

Sebagian besar warga Desa Jatisari hanya berpendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Pertama bahkan ada yang hanya lulusan SD (Sekolah Dasar), mereka berpandangan bahwa bagi seorang perempuan pendidikan tidaklah dianggap begitu penting, sebab anggapan orang tua seorang wanita nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Apabila anak perempuan yang telah lulus dari sekolah dianggap telah dewasa, mampu menjadi seorang istri, dan orang tuapun sudah lepas dari tanggung jawab setelah anaknya menikah. Begitupun untuk laki-laki tidak perlu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena menurutnya lebih baik

cepat untuk mendapatkan pekerjaan dengan hanya bekal ijazah SD, SMP dan atau SMA, bahkan kebanyakan pemuda di Desa Jatisari mereka lebih memilih merantau untuk mendapatkan pekerjaan di luar kota ketimbang tinggal di kampungnya untuk membangun desanya sendiri. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Dampak yang kemudian muncul dari kurangnya pendidikan untuk warga Desa Jatisari antara lain kesadaran hukum yang rendah, sejatinya mereka tidak terlalupaham seperti apa hukum itu harusnya dijalankan, bagaimana hukum itu bisa melindungi warga negaranya, apa manfaatnya jika kita taat hukum, dan sebagainya. Alhasil pernikahan yang menurut negara harus dilegalkan dengan dicatatkan oleh petugas pernikahan secara resmipun sedikit diabaikan. Mereka tidak memikirkan bagaimana dampak hukum ke depannya karena menurutnya menikah secara agamapun yang kita sebut dengan pernikahan siri itu sudah cukup bagi mereka.

5) Untuk menghindari diri dari perbuatan zina

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu orang tua ada yang lebih memilih untuk mengawinkan anaknya dengan caranikah siri.

6) Kondisi sosial budaya atau adat istiadat

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan. Tidak hanya faktor karena kondisi sosial ekonomi saja yang meletarbelakanginya, tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakat jugayang menganggap lumrah pernikahan siri. Kebiasaan masyarakat terbiasa menikahkan anaknya lewat pernikahan siri menjadikan nikah siri tidak lagi menjadi hal yang tabu.

Baik buruknya pemikiran mengenai dilakukannya perkawinan siri oleh seseorang dalam pandangannya, tergantung pada kebudayaan setempat. Oleh karena itulah maka sering kali ditemukan perbedaan anggapan tentang nikah siri dalam suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang terbiasa melakukan atau memilih nikah siri sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan karena faktor ekonomi maka nikah siri tidaklah dianggap buruk.

Beda halnya dengan masyarakat yang tidak terbiasa melakukan nikah siri maka pelaksanaan nikah siri akan dipandang tidak wajar atau bahkan dianggap sinis. Bahkan pernikahan siri di daerah semacam ini

dipandang sebagai suatu niatan yang tidak sungguh-sungguh dalam mahligai rumah tangga. Apapun alasan yang dikemukakan maka pernikahan siri tetap akan dipandang sebagai hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Dengan bermacam-macam alasan di atas orang melakukan nikah siri, tanpa memikirkan akibat apa yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Dan tidak memikirkan hidup selanjutnya apabila suatu saat nanti sang suami pergi meninggalkan begitu saja, sehingga tidak ada kepastian mengenai perkawinannya tersebut. Padahal banyak sekali yang mereka tidak ketahui tentang akibat nikah siri tersebut, misalnya apabila nanti terjadi perceraian sang istri tidak mendapatkan harta gono gini. Dan akibat buat si anak adalah sulit untuk membuat akta kelahiran, sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan akta nikah atau buku nikah. Sedangkan nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi warga yang bersangkutan untuk nikah siri adalah kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, selain itu karena kondisi sosial budaya atau adat istiadat.

Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum. Nikah siri membawa dampak dan sangat merugikan bagi istri dan anaknya, bagi kedua belah pihak adalah secara sosiologis mendapatkan gunjingan dari masyarakat sekitar dan malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosialnya. Apabila dilihat dari segi hukum mempunyai dampak yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama bagi istri karena si suami dapat pergi meninggalkan istri kapan saja dan si istri tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak dapat menuntut sang suami di hadapan hukum karena perkawinan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai bukti autentik. Sehingga akhirnya istrilah yang harus menanggung semua biaya dan nafkah termasuk pendidikan sang anak.

Berlangsungnya nikah siri secara budaya ini, dilihat dari sisi pemerintahan, akibat kurang responsifnya pemerintahan hingga saat ini, sehingga perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten Cianjur.

Saran yang dapat dikemukakan diantaranya untuk kepentingan masa depan bagi mereka yang terlanjur menikah siri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag punya program untuk mendata

seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh Pengadilan Agama, dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga membutuhkan dana besar, tenaga dan waktu. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan bagi semua orang yang tidak mempunyai buku nikah. Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan. Sehingga pemerintahan desa Jatisari perlu koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Pengadilan Agama, dan Instansi/SKPD terkait lainnya.

Bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah siri dan belum punya anak, maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Bagi remaja atau calon pasangan yang belum menikah atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan tentang nikah siri dari OPD terkait, supaya sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan siri membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan siri tidak terjadi di masyarakat. Perlu efektifitas kerjasama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi. Selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa

memberikan input, pressure kepihak-pihak yang melakukan nikah siri. Harusnya LSM, organisasi perempuan bergandeng tangan mencegah pernikahan siri.

Pemerintahan setempat (Desa, Kecamatan dan Instansi/ OPD Terkait) perlu terus meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi, serta penyuluhan secara team work dengan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya yang terkait dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Somaad. 2012. Hukum Islam: Penomoran Perinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aulawi, Wasit. 1996. Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum. No. 28.
- Azhar, Ahamad Basyir. 2000. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pers.
- Ali, Zainudun. 2006. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Arto, Mukti. 1996. Masalah pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan, Mimbar Hukum, No. 26 Thn, VII, 1996.
- Burhanudin. 2003. Makalah Permasalahan Akumulasi Permohonan Isbath Nikah, Acara diskusi pengadilan Agama Sleman.
- Djamali, Abdul, 1997. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muamar, Akhsin, 2005. *Nikah Bawah Tangan*. Depok: Qultum Media.
- Nurhaedi, Dadi, 2003. *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*. Yogyakarta:
- Saujana. Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 Jakarta: BulanBintang.

- Nasution, khoirudin. 2005. *Hukum Perkawinan* 1, Yogyakarta:Academia + Tazzafa.
- ,.2009.*Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta:Academia danTazzafa.
- Naruddin,Amir dkk.2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi krisis perkembangan hukum islam dan piqh*, Jakarta: Kencana.
- Shadily, Hassan, 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Perinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet ke-1 Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman.2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar maju.
- Hanan, Damsayi. 1997. *Permasalahan Isbath Nikah (kajian terhadap pasal 2 UU No 1Tahun1974 dan pasal 7 KHI) Mimbar hukum*, No. 31 Tahun VIII, Maret April.
- Rusli, An R. Tama.1984. *Perkawinan Antara Agama dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit, Shantika Dharma.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Nikah Islam di Indonesia, Antara fiqih Munakahat dan Undang-undang Nikah*. Cet. II. Jakarta: Kencana
- Kompilasi Hukum Islam.2012. Bandung: Fokus Media.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahyu, Asep.2015. Laporan Tahunan Kepala Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2015.